

AGAMA

DALAM NEGARA

KEBANGSAAN YANG DEMOKRATIS: TANTANGAN DAN PROSPEK

PENGANTAR

Tentang agama ada dua macam wacana (dan beberapa lebih banyak). Menurut yang satu agama-agama merupakan berkat bagi masyarakat. Betapa tidak. Agama diasosiasikan dengan gambaran orang yang berbudi luhur, lapang hatinya, baik, hati, jujur, adil, tidak picik, tidak sempit, tidak dendam, yang menguasai emosi, yang membalas yang buruk dengan yang baik (Bah.Jawa: sapa becik dèn beciki, sapa ala dèn beciki), berbelas-kasih, berdamai. Dalam wacana satunya agama dihubungkan dengan kepicikan, kebencian, pertikaian, perbuatan keji, pembunuhan, huru-hara, perusakan, kerusuhan, terorisme. Mana yang betul? Yang benar adalah bahwa dua-duanya betul, dan oleh karena itu rupa-rupanya agama merupakan tantangan bagi orang-orang beragama sendiri.

Kalau kita lalu mengingat pelbagai kerusuhan dan peristiwa dalam dua tahun terakhir di tanah air, baik di pulau Jawa maupun di daerah-daerah, pertanyaan tentang sikap, dan sumbangan, agama terhadap pewujudan kehidupan kebangsaan yang demokratis sudah tepat kalau diajukan.

EKSKLUSIVISME DAN PURITANISASI

Mari kita bertanya langsung saja to the point: Apakah kesadaran beragama mendalam dapat bersamaan dengan perasaan kebangsaan? Bukankah mesti ada konflik loyalitas?

Konflik loyalitas antara bangsa dan agama, misalnya: orang beragama, karena terlibat hatinya pada agama, merasa dingin terhadap nilai-nilai kebangsaan dan lalu sering juga terhadap nilai-nilai budaya lokal maupun nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada terutama dua tendensi dalam kalangan beragama yang akan membuat mereka semakin tertutup: eksklusivisme dan puritanisasi agama.

Dengan eksklusivisme agama saya maksud bahwa sebuah agama menuntut agar seluruh kehidupan bangsa dijalankan secara eksklusif menurut cita-cita agama itu. Eksklusivisme itu akan membuat golongan agama itu resah terus selama negara dan pemerintah memberi perhatian kepada semua golongan agama. Negara yang mengakui adanya pluralitas dalam masyarakat dengan demikian tidak pernah akan diterima oleh golongan agama yang eksklusif itu. Golongan eksklusif itu lalu

merasa dilalaikan, atau bahkan dimusuhi oleh negara dan tidak mengidentifikasikan diri dengannya, hanya karena negara menjamin lingkungan sosial yang memungkinkan semua golongan dalam masyarakat untuk krasan dan hidup menurut identitas mereka. Agama yang mengarah ke **eksklusivisme** semakin **sulit** ditampung dalam **kesatuan negara pluralistik**. Eksklusivisme itu juga membuat agama itu tidak akan menghayati nasionalisme, karena ia semata-mata terarah pada cita-cita eksklusif keagamaannya sendiri.

Dengan **puritanisasi** agama (dari Puritanisme, aliran keras dalam Gereja Anglikan Inggris abad ke-16 yang mau membersihkan -**mempurifikasi**- Gereja dari sisa-sisa Katolik, dan sesudah ditolak, sebagian pindah ke Amerika sebagai the pilgrim fathers) dimaksud **usaha untuk membersihkan kehidupan beragama dari semua unsur yang tidak berasal dari dasar asaliah agama itu sendiri**. Agama mau **dibersihkan** dari semua unsur "manusiawi" seperti budaya lokal, cita-cita moral dan politik yang lebih luas, pengaruh "asing" dlsb. Yang sering disebut **fundamentalisme** (yang sebenarnya berarti pengartian harafiah Kitab Suci agama ybs.) lebih tepat disebut puritanisme. Kaum puritan umumnya menolak nasionalisme karena akan dicap sebagai "sekuler".

Baik eksklusivisme maupun puritanisme agama tidak mungkin bersamaan dengan nasionalisme. **Nasionalisme** sendiri adalah **nilai kemanusiaan**, bukan khas agama tertentu. Di

mana dua tendensi itu muncul, kekerasan sulit dihindari. Karena semua pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan puritan itu akan ditolak. Sikap itu pada umumnya tidak hanya menimbulkan kesulitan dengan penganut agama lain, melainkan dengan penganut agama sendiri karena di dalam semua agama besar ada pandangan yang berbeda mengenai gaya hidup menurut agama itu. Sehingga puritanisme apabila menjadi eksklusif, juga membersihkan umat agamanya sendiri dari semua pandangan yang plural, misalnya yang menyangkut bentuk ibadat, pakaian, kewajiban dlsb.

Tendensi ke eksklusivisme dan puritanisme dapat memperlihatkan diri dalam banyak gejala. Eksklusifitas dalam memakai istilah agama sendiri dan keseganan memakai kata-kata dari budaya lokal kalau berkomunikasi di luar lingkungan sefaham. Eksklusifitas dalam pergaulan. Penolakan pluralisme wajar di dalam umat agamanya sendiri, disertai interpretasi sempit terhadap norma-norma agama sendiri di mana saudara seagama yang mempunyai pandangan atau kebiasaan lain "**dikafirkan**". Penolakan terhadap kesamaan kedudukan kewarganegaraan umat beragama lain. Keengganan untuk berkompromis, untuk fair play, untuk mengakui bahwa pada prinsipnya semua peserta masyarakat wajib diberi ruang kekerasan yang sama.

Maka dapat dikatakan: makin kuat tendensi-tendensi eksklusivistik dan puritanistik dalam sebuah agama, makin akan

ada masalah loyalitas nasional serta kemampuan untuk ikut dalam kebersamaan sebuah bangsa yang pluralistik.

DASAR EKSKLUSIVISME DAN PURITANISASI

Apakah agama-agama harus, karena dinamika internal, menjadi eksklusivistik dan puritanistik?

Jawaban harus diberikan oleh masing-masing agama sendiri. Tetapi kalau kita bertanya pada agama-agama besar sendiri -dan memeriksa ajaran mereka secara objektif- kita senantiasa akan menemukan jawaban bahwa -meskipun mereka yakin akan dirinya sendiri dan tidak menyetujui ucapakn se-enaknya bahwa "semua agama sama saja"- tidak condong memaksakan diri pada penganut agama lain; mereka sepakat bahwa tak ada gunanya memeluk agama kecuali karena diyakini: mereka bersedia untuk memberikan hak hidup kepada umat beragama lain; mereka juga bersedia untuk menerima bahwa masyarakat dan negara diselenggarakan sedemikian rupa hingga semua umat beragama dapat hidup berdampingan secara wajar, sesuai dengan identitas masing-masing dan dalam derajat yang sama. Mereka bersedia mengaku adanya budaya setempat, adanya nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, mereka mencintai bangsa dan negara sendiri.

Itu bukan hanya teori. Sejarah Republik ini membuktikannya. Sesudah hal dasar negara berhasil diselesaikan dengan **Pancasila**, kaum "Islamis" dan kaum "nasionalis" (yang

hampir semua juga beragama Islam) bersama-sama memperjuangkan Kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan pada waktu ada beberapa gerakan radikal "Darul Islam", seluruh mainstream partai dan organisasi Islam, baik yang "tradisional" maupun "reformis", berfihak pada **Republik**.

Maka kita mesti bertanya: Apa yang dapat mendorong **sebuah kecenderungan** ke arah **eksklusivisme**, **puritanisme** dan **penolakan** semua nilai yang tidak langsung agamis? Kiranya ada dua. Yang **satu internal**. Dalam kebanyakan agama ada pelbagai penghayatan terhadapnya. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup, ada yang "liberal" dan ada yang "fundamentalis", ada yang tenang dan ada yang fanatik. Eksklusivisme dan puritanisme biasanya mulai di kelompok-kelompok intelektual agama. Mereka mau membersihkan agama dan yang "kafir". Itu yang pertama. Yang **kedua** adalah apabila situasi masyarakat memburuk: Masyarakat tidak mempunyai harapan, kesenjangan besar, masyarakat merasa berlangsungnya ketidakadilan yang berkelanjutan, tak ada perbaikan. Dalam situasi itu fanatisme dan puritanisme akan menemukan tanah subur untuk meluas.

AGAMA MENDUKUNG KEBANGSAAN

Maka kalau pengeringan loyalitas dan cinta kebangsaan mau dihindari, kedua-dua faktor perlu diperhatikan. Di satu fihak **keadilan sosial** memang harus diwujudkan, sekurang-

kurangnya, ketidakadilan-ketidakadilan paling mencolok perlu dihapus. Begitu pula perlu diciptakan suasana **keterbukaan demokratis** yang memungkinkan masyarakat menyuarakan keluhan, kritikan dan harapan mereka serta merasakan terwakilkan dalam pemerintah.

Yang kedua menyangkut keterbukaan teologis dalam masing-masing agama sendiri. Bukan hanya demi kepentingan bangsa, melainkan demi kesetiaan pada perutusan Ilahi sendiri agama-agama, dan itu berarti: para panutan, para teolog, para pemimpin, para cendekiawan tidak boleh membiarkan tendensi-tendensi eksklusivistik dan puritanistik meluas. Mereka dapat diharapkan menjadi pendukung utama cita-cita kemanusiaan dan peradaban, mereka memperjuangkan cita-cita demokrasi seperti keterbukaan, kesamaan semua warga masyarakat sebagai warga negara, hak-hak asasi manusia, toleransi, solidaritas juga dengan kawan sebangsa yang beragama atau dari suku lain. Mereka memperjuangkan keadilan sosial dan merasa bertanggungjawab untuk menghindari tanah air dan bumi dari perusakan lingkungan hidup.

Dapat dikatakan, agama-agama berhadapan dengan sebuah **tantangan**: Maukah mereka menjadi pendukung utama etika kemanusiaan universal dan bertekad mewujudkan struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomis dunia yang sedang datang sesuai dengan martabat manusia itu? Hal mana juga berarti bahwa mereka terbuka pada cita-cita nasional, pada

kebudayaan-kebudayaan lokal yang sudah ada, pada pluralitas. Ataukah mereka menjadi takut, negatif, menutup diri sehingga semakin akan dipersalahkan sebagai sumber konflik dan kekejaman? Dapatkah agama-agama mengatasi godaan untuk menjadi sempit, ego-sentrik, dan eksklusif, serta, sebaliknya, berani menjadi benteng toleransi, pergaulan yang beradab, keadilan, prihatin pada fihak lemah entah termasuk kelompok agama sendiri entah tidak? Maukah mereka menjadi pelindung segala macam minoritas dan pembela hak-hak mereka yang tertindas tanpa membedakan menurut golongan? Dapatkah mereka membuat kepentingan seluruh umat manusia, segenap orang, termasuk yang lain sikap hidup dan kepercayaannya, menjadi keprihatinan mereka, tanpa pamrih? Pendeknya bersediakah agama-agama menjadi penegak keberadaban, keadilan dan solidaritas antara manusia?

PENUTUP

Sesudah ideologi-ideologi keselamatan sekularistik seperti liberalisme dan sosialisme kehabisan nafas, agama-agama yang ditantang untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan dalam masyarakat pluralis yang baik, sejahtera, solid, berdamai, adil, makmur dan bermoral.

Siapkah agama-agama? Jawaban harus kita berikan sendiri.

(Naskah untuk Hidup Juni 1998)